

Peran Integrasi Manajemen Pendidikan Berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Mewujudkan Keadilan Akses, Peningkatan Mutu, dan Keberlanjutan Sistem Pendidikan

Hegar Harini¹, Ahmad Jauhari Hamid Ripki², Herlina³, Masrum⁴, Arbiana Putri⁵

^{1,2,3,4,5} STKIP Kusuma Negara, Indonesia

E-mail: hegar@stkipkusumanegara.ac.id¹, ahmadjauhari@stkipkusumanegara.ac.id²,
herlina.mahtum@stkipkusumanegara.ac.id³, masrum@stkipkusumanegara.ac.id⁴,
arbiana_putri@stkipkusumanegara.ac.id⁵

Article History:

Received: 10 Oktober 2025

Revised: 23 Oktober 2025

Accepted: 24 Oktober 2025

Keywords:

Manajemen Pendidikan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Akses dan Kesetaraan, Kualitas Pendidikan, Keberlanjutan.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integrasi manajemen pendidikan berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam mencapai akses yang adil, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel, termasuk Google Scholar dan situs web resmi organisasi internasional, yang mencakup periode 1950 hingga 2025. Dari 50 artikel yang diidentifikasi pada awalnya, hanya 31 yang memenuhi kriteria seleksi ketat dan dianalisis lebih lanjut. Temuan ini mengungkapkan bahwa mengintegrasikan prinsip-prinsip SDG ke dalam manajemen pendidikan meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat inklusivitas, dan menumbuhkan kesadaran keberlanjutan dalam sistem pendidikan. Secara teoritis, hasil ini memperkuat relevansi Teori Sistem Terbuka dan Teori Kepemimpinan Transformasional dalam menjelaskan hubungan antara kepemimpinan, kebijakan pendidikan, dan keberlanjutan. Secara empiris, studi kasus seperti program “Sekolah Adiwiyata” dan Kantor Keberlanjutan Universitas Gadjah Mada menunjukkan implementasi nyata prinsip-prinsip SDG di tingkat institusi. Studi ini menekankan bahwa manajemen pendidikan berorientasi SDG bukan sekadar alat administratif, melainkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesetaraan, kualitas, dan ketahanan sistemik. Namun, penelitian ini terbatas oleh cakupan sumber dan sifat deskriptifnya; Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran guna menilai efektivitas implementasi SDG secara lebih komprehensif.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Sejak disepakatinya Agenda 2030 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pendidikan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-4, yaitu *Quality Education* yang menekankan pentingnya menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua orang di setiap jenjang (UNDP, 2025). Namun, realitas di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan infrastruktur, keterbatasan tenaga pendidik berkualitas, serta ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya menyebabkan sebagian masyarakat belum dapat menikmati hak pendidikan secara adil dan bermutu. Kondisi ini menuntut adanya integrasi kebijakan dan sistem manajemen pendidikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs agar pendidikan dapat benar-benar menjadi sarana pemerataan dan pemberdayaan.

Integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs dimaknai sebagai upaya administratif atau perencanaan strategis dan transformasi paradigma dalam tata kelola pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan harus dilihat sebagai sistem yang saling terkait dengan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dalam konteks manajemen pendidikan, hal ini berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, keberlanjutan sumber daya, serta pemberdayaan generasi masa depan. Di Indonesia, beberapa kebijakan seperti Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak, dan digitalisasi pembelajaran mulai diarahkan untuk mengakomodasi nilai-nilai keberlanjutan (Anugrahmawaty, 2025). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti kesenjangan digital, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang konsep SDGs di tingkat institusi pendidikan.

Keadilan akses pendidikan merupakan aspek pertama yang menjadi perhatian utama dalam kerangka SDGs. Prinsip *leave no one behind* menjadi dasar bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, status sosial, disabilitas, atau lokasi geografis, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan (United Nations, 2025c). Dalam konteks manajemen pendidikan, keadilan akses berarti bahwa kebijakan distribusi sumber daya pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan dan daerah tertinggal. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Daerah 3T, dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) telah berupaya memperluas akses pendidikan. Namun, efektivitas program tersebut masih bergantung pada tata kelola yang baik, sinergi antar lembaga, dan mekanisme monitoring yang berkelanjutan.

Selain keadilan akses, dimensi kedua yang menjadi fokus integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs adalah peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, relevansi pembelajaran, dan kemampuan lembaga pendidikan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan global. Dalam konteks SDGs, peningkatan mutu juga berarti membangun sistem pendidikan yang menumbuhkan kompetensi abad ke-21 seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kesadaran lingkungan (United Nations, 2025a). Di Indonesia, inisiatif seperti Kurikulum Merdeka telah menggeser fokus pembelajaran dari sekadar kognitif menuju pengembangan karakter dan kompetensi holistik. Namun, integrasi prinsip SDGs dalam manajemen pendidikan menuntut lebih dari sekadar reformasi kurikulum, ia membutuhkan tata kelola yang mendorong inovasi, pengawasan mutu yang konsisten, serta sistem evaluasi yang menilai keberlanjutan dan dampak sosial dari pendidikan itu sendiri.

Dimensi ketiga, yaitu keberlanjutan sistem pendidikan, menegaskan pentingnya

menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu bertahan menghadapi tantangan masa depan. Keberlanjutan ini mencakup aspek ekonomi (pendanaan jangka panjang), sosial (inklusi dan kesetaraan), serta lingkungan (efisiensi energi, pelestarian sumber daya, dan pembelajaran berbasis ekologi). Dalam praktiknya, manajemen pendidikan berbasis SDGs dapat diterjemahkan melalui kebijakan yang mendorong sekolah ramah lingkungan, integrasi pendidikan hijau, serta penguatan kemitraan antara sekolah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil (Nasution, 2024). Program seperti Adiwiyata dan Kampus Merdeka Hijau merupakan contoh nyata penerapan prinsip keberlanjutan dalam konteks pendidikan nasional. Namun, banyak institusi pendidikan yang masih berfokus pada pencapaian target administratif tanpa memahami nilai jangka panjang dari keberlanjutan, sehingga dibutuhkan pendekatan manajerial yang lebih visioner dan partisipatif.

Integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs juga menuntut peran aktif dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara sekolah dan perguruan tinggi menjadi pelaksana utama transformasi pendidikan di lapangan. Di sisi lain, masyarakat dan sektor industri dapat memberikan dukungan berupa sumber daya, teknologi, dan praktik terbaik untuk memperkaya proses pembelajaran. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pihak, implementasi SDGs dalam manajemen pendidikan akan sulit tercapai (United Nations, 2025b).

Selain itu, kemajuan teknologi informasi turut memberikan peluang sekaligus tantangan dalam upaya mengintegrasikan manajemen pendidikan berbasis SDGs. Digitalisasi pendidikan memungkinkan penyebaran informasi, pembelajaran jarak jauh, serta sistem manajemen sekolah yang lebih efisien. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak (OECD, 2025). Manajemen pendidikan berbasis SDGs harus memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara inklusif dan memperkuat prinsip keadilan akses. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, serta monitoring capaian SDGs dalam sektor pendidikan melalui sistem data yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dari perspektif akademik, penting untuk meninjau secara komprehensif bagaimana integrasi manajemen pendidikan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan dan dalam konteks sosial yang beragam, karena keberhasilan pencapaian SDG 4 tentang “*Quality Education*” bergantung pada efektivitas tata kelola di tingkat institusi pendidikan. Studi-studi internasional menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai keberlanjutan dalam manajemen pendidikan menuntut peran aktif kepemimpinan transformasional, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kebijakan yang menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari perencanaan strategis pendidikan. Misalnya, riset oleh Uleanya (2024) menjelaskan bahwa kepemimpinan sekolah yang berorientasi pada keberlanjutan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kesadaran lingkungan dan budaya tanggung jawab sosial di sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan yang sejalan dengan SDGs berbicara soal sistem manajemen pendidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan visioner.

Selain itu, tinjauan global yang dilakukan oleh Pham & Håkansson (2025) mengungkap bahwa mayoritas lembaga pendidikan di berbagai negara masih berada pada tahap awal dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kurikulum dan sistem kelebagaannya. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun kesadaran terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan meningkat,

hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan kurangnya indikator pengukuran masih menjadi kendala besar. Hasil ini relevan bagi konteks Indonesia, di mana kebijakan seperti Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak mulai mengarah pada penerapan nilai-nilai keberlanjutan, namun masih memerlukan mekanisme evaluasi yang terukur untuk memastikan efektivitas implementasinya. Lebih lanjut, penelitian oleh Durrani et al. (2023) menyoroti bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memperkuat urgensi keadilan akses pendidikan. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memperluas peluang pembelajaran jarak jauh, ketimpangan akses terhadap perangkat dan konektivitas justru memperdalam kesenjangan antara peserta didik di perkotaan dan pedesaan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan manajemen pendidikan berbasis SDGs menuntut strategi digitalisasi yang inklusif, dengan perhatian khusus pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam tataran kebijakan dan kurikulum, masih sedikit kajian yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana lembaga pendidikan menginternalisasi nilai keberlanjutan ke dalam proses manajerialnya, termasuk dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, pendekatan tinjauan pustaka menjadi relevan untuk menggali lebih dalam konsep, model, serta praktik terbaik dari berbagai studi global tentang hubungan antara manajemen pendidikan dan prinsip-prinsip SDGs, yang selanjutnya dapat dibandingkan dan diadaptasi dengan konteks pendidikan di Indonesia. Melalui sintesis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan model konseptual integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs yang menjamin keberlanjutan sistem pendidikan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integrasi manajemen pendidikan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mewujudkan keadilan akses, peningkatan mutu, dan keberlanjutan sistem pendidikan, dengan pendekatan tinjauan pustaka yang berfokus pada literatur akademik dan kebijakan pendidikan global maupun nasional selama beberapa tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai kajian ilmiah terkait integrasi manajemen pendidikan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mewujudkan keadilan akses, peningkatan mutu, dan keberlanjutan sistem pendidikan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan keterkaitan konsep-konsep manajemen pendidikan dengan prinsip-prinsip SDGs secara deskriptif, bukan pada pengukuran kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan secara sistematis temuan-temuan konseptual dan empiris dari berbagai sumber akademik untuk menghasilkan sintesis yang komprehensif dan berorientasi pada pengembangan model konseptual.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar serta situs web akademik dan lembaga kredibel seperti SpringerLink, ScienceDirect, Taylor & Francis Online, dan MDPI. Periode publikasi yang dijadikan acuan adalah tahun 1950 hingga 2025, agar data yang dianalisis relevan dengan perkembangan terkini dalam implementasi SDGs di bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “educational management and SDGs,” “*sustainable education system*,” “*equity in education*,” “*quality education management*,” dan “*sustainability in educational institutions*.” Dari hasil pencarian awal, diperoleh sebanyak 50 artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Selanjutnya, dilakukan proses seleksi ketat untuk menentukan literatur yang sesuai dengan kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau lembaga riset bereputasi, (2) membahas keterkaitan antara manajemen pendidikan dan prinsip SDGs, (3) mencakup dimensi akses, mutu, atau keberlanjutan pendidikan, serta (4) tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut, termasuk yang hanya bersifat opini atau tidak mengandung data empiris dan konseptual yang kuat, dieliminasi. Setelah proses penyaringan, diperoleh 31 artikel utama yang digunakan sebagai sumber utama dalam analisis penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah meliputi: (1) membaca dan memahami isi setiap artikel secara menyeluruh; (2) mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan manajemen pendidikan dan implementasi SDGs; (3) mengelompokkan artikel berdasarkan fokus kajian seperti keadilan akses, peningkatan mutu, dan keberlanjutan sistem pendidikan; serta (4) menyusun sintesis dari berbagai temuan untuk membangun kerangka konseptual integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan reflektif, dengan mempertimbangkan kesesuaian teori, konteks, dan hasil penelitian terdahulu agar diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi manajemen pendidikan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan langkah strategis yang menegaskan bahwa pendidikan tidak lagi sekadar wadah untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga instrumen fundamental dalam membentuk tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk memadukan visi jangka panjang pembangunan global ke dalam sistem pendidikan nasional yang relevan dengan konteks lokal. Dalam perspektif *Open System Theory* yang diperkenalkan oleh von Bertalanffy (1950), lembaga pendidikan dipandang sebagai subsistem yang berinteraksi dinamis dengan lingkungannya—masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan alam. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya dari input dan output internal, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Ketika teori sistem terbuka diimplementasikan dalam konteks pendidikan berbasis SDGs, maka setiap komponen—kurikulum, tenaga pendidik, kebijakan, serta sarana-prasarana—harus berfungsi secara sinergis, fleksibel, dan inklusif. Studi oleh Ghamrawi (2023) yang meneliti sekolah-sekolah di Qatar membuktikan bahwa sistem pendidikan yang terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi lintas sektor mampu memperkuat pencapaian SDG 4 (*Quality Education*) karena lebih responsif terhadap tantangan zaman, seperti disrupsi digital dan transformasi sosial.

Dalam konteks keadilan akses pendidikan, Teori Keadilan Rawls (2005) memberikan landasan filosofis yang kuat untuk menegaskan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi seluruh

warga negara. Rawls menekankan bahwa prinsip *fair equality of opportunity* menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau disabilitas, memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam praktik manajemen pendidikan modern, di mana kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial masih menjadi persoalan serius. Penelitian Amirova et al. (2023) di Kazakhstan memperlihatkan bahwa manajemen pendidikan yang tidak siap menghadapi transisi digital selama pandemi COVID-19 menyebabkan ketimpangan pembelajaran antara siswa di wilayah urban dan rural, sebuah fenomena yang juga terjadi di Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Di wilayah-wilayah tersebut, keterbatasan infrastruktur digital dan tenaga pendidik yang belum terlatih dalam pembelajaran daring menghambat pemerataan mutu pendidikan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia menginisiasi berbagai kebijakan seperti Program Indonesia Pintar, Merdeka Belajar, dan Sekolah Digital Desa yang bertujuan memperluas jangkauan akses serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, sesuai dengan semangat SDG 4 yang menuntut pendidikan inklusif dan berkeadilan.

Dimensi peningkatan mutu pendidikan dalam kerangka SDGs dapat dikaji lebih mendalam menggunakan pendekatan *Total Quality Management (TQM)* yang diperkenalkan oleh W. Edwards Deming pada tahun 1986 (Gartner et al., 1988). Teori ini menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), keterlibatan seluruh unsur organisasi, serta orientasi terhadap kepuasan pelanggan dalam konteks pendidikan berarti kepuasan peserta didik dan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan. Ketika prinsip TQM diintegrasikan dengan tujuan SDGs, mutu pendidikan dipahami sebagai upaya menyeluruh untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, tanggung jawab sosial, serta kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Hasil riset oleh Perales & McCowan (2021) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip SDGs dalam sistem manajemennya menunjukkan peningkatan signifikan dalam inovasi kurikulum, efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, serta relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat global. Contoh konkret dapat dilihat pada Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah mengadopsi sistem manajemen mutu berbasis keberlanjutan melalui *Sustainability Office*, yang secara konsisten memantau ketercapaian indikator SDGs di setiap fakultas dan program studi (SDGS Center, 2025). Upaya ini memperkuat kontribusi universitas terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun internasional.

Dalam konteks keberlanjutan sistem pendidikan, *Sustainable Development Theory* yang dikemukakan oleh Brundtland pada tahun 1987 memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hubungan antara pembangunan dan tanggung jawab lintas generasi (Hoyos et al., 2010). Teori ini menegaskan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Prinsip keberlanjutan tersebut menjadi landasan moral dan operasional dalam merancang kebijakan pendidikan yang berorientasi jangka panjang, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dalam praktiknya, pendidikan yang berlandaskan teori ini menuntut adanya integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam kurikulum, manajemen sekolah, serta perilaku sosial siswa dan guru. Program Adiwiyata di Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana prinsip *Sustainable Development Theory* diimplementasikan secara praktis (Ismail et al., 2024; Sagala, 2019; Situmorang et al., 2025). Sekolah-sekolah yang berstatus Adiwiyata menanamkan kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, serta efisiensi energi dalam aktivitas pembelajarannya. Penelitian terdahulu memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan

prinsip green management berhasil membangun kultur organisasi yang disiplin, efisien, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi (Somwaru, 2016; Yli-Panula et al., 2022). Artinya, penerapan teori Brundtland dalam pendidikan berdampak sistemik terhadap perilaku, etos kerja, dan arah kebijakan lembaga pendidikan.

Integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs tidak dapat dilepaskan dari peran kepemimpinan yang visioner dan transformatif, sebagaimana dijelaskan dalam *Transformational Leadership Theory* oleh Burns (1978). Teori ini menegaskan bahwa pemimpin sejati menginspirasi dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih bermakna. Dalam konteks manajemen pendidikan, gaya kepemimpinan transformasional sangat penting untuk mendorong perubahan paradigma dari pendidikan yang berorientasi administratif menuju pendidikan yang berorientasi nilai, kolaborasi, dan keberlanjutan. Pemimpin pendidikan yang transformasional berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu menyalakan motivasi intrinsik guru, mendorong inovasi pembelajaran, serta menanamkan semangat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 4 (*Quality Education*). Penelitian terdahulu membuktikan bahwa kepala sekolah yang mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional berhasil meningkatkan partisipasi guru dalam pelatihan pengembangan profesional serta memperkuat implementasi pembelajaran berbasis keberlanjutan (Lukman & Gistituati, 2024). Di Indonesia, konsep ini terefleksikan dalam kebijakan Sekolah Penggerak, di mana kepala sekolah diberdayakan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berani bereksperimen, berorientasi pada nilai kemanusiaan, dan fokus pada pengembangan karakter siswa. Melalui gaya kepemimpinan seperti ini, transformasi pendidikan menjadi gerakan moral dan sosial yang mampu menggerakkan seluruh elemen pendidikan menuju masa depan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sementara itu, dari perspektif implementasi praktis dan strategis, *Stakeholder Theory* yang diperkenalkan oleh Freeman & McVea (2001) memberikan pandangan bahwa keberhasilan organisasi, termasuk lembaga pendidikan, sangat bergantung pada sejauh mana ia mampu membangun hubungan kolaboratif yang produktif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks pendidikan berbasis SDGs, teori ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kemitraan strategis yang memperkuat relevansi pendidikan terhadap dunia kerja dan pembangunan berkelanjutan. Program Kampus Merdeka di Indonesia merupakan representasi nyata dari penerapan teori ini, di mana universitas bekerja sama dengan industri dan lembaga sosial dalam mengembangkan kurikulum yang aplikatif serta menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan global. Hasil penelitian terdahulu mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa model pendidikan berbasis kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat transformasi sistem pendidikan menuju struktur yang lebih responsif dan partisipatif (Mehling & Kollect, 2019). Dengan demikian, penerapan *Stakeholder Theory* dalam pendidikan berbasis SDGs memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam membentuk masa depan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Selain teori dan kebijakan yang menjadi fondasi konseptual, kemajuan teknologi informasi juga memainkan peran strategis dalam mempercepat transformasi manajemen pendidikan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam perspektif *Diffusion of Innovation Theory* yang dikemukakan oleh Rogers et al. (2019), adopsi inovasi, termasuk teknologi pendidikan, sangat bergantung pada lima elemen utama yaitu inovasi itu sendiri, saluran

komunikasi, waktu, sistem sosial, serta karakteristik individu yang mengadopsinya. Rogers menjelaskan bahwa penyebaran teknologi tidak akan efektif jika pengguna tidak memahami manfaatnya (*perceived usefulness*), menganggapnya sulit digunakan (*complexity*), atau tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai dari lingkungannya. Dalam konteks manajemen pendidikan berkelanjutan, teori ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan digitalisasi ditentukan oleh kesiapan budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang menggunakannya. Teknologi berpotensi besar menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah rural, jika dikelola secara strategis dan disertai pelatihan digital yang berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dalam manajemen sekolah di Indonesia mampu memperluas akses pembelajaran hingga ke daerah terpencil, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat transparansi tata kelola sekolah (Setiawati et al., 2025). Salah satu contoh sukses adalah Sekolah Digital Nusantara di Kabupaten Banyuwangi yang memanfaatkan platform digital terpadu untuk mengelola kegiatan pembelajaran, administrasi, serta pelaporan akademik secara daring (Lestari, 2024). Transformasi digital ini membentuk budaya manajemen yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan, sejalan dengan semangat SDGs untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua.

Dengan mengacu pada berbagai teori manajemen, kepemimpinan, dan inovasi yang telah dianalisis, dapat dinyatakan bahwa integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs merupakan pendekatan holistik yang menempatkan keadilan, mutu, dan keberlanjutan sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi ini menuntut sinergi antara teori *Open System* dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif terhadap lingkungan, Teori Keadilan Rawls dalam menjamin akses yang setara, *Total Quality Management* untuk memastikan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, *Transformational Leadership* untuk menggerakkan perubahan nilai dan budaya organisasi, *Stakeholder Theory* untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta *Diffusion of Innovation Theory* dalam mempercepat adopsi teknologi pendidikan. Namun, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan makro yang dicanangkan pemerintah dan implementasi mikro di tingkat sekolah atau perguruan tinggi. Banyak institusi pendidikan masih berfokus pada kepatuhan administratif tanpa mampu mentransformasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam praktik nyata manajemen. Oleh karena itu, dibutuhkan model konseptual baru yang mampu menjembatani celah tersebut melalui pendekatan tata kelola yang adaptif, partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada hasil (*outcome-based management*). Model ini harus mampu mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan serta evaluasi kinerja pendidikan. Melalui sintesis literatur dan temuan empiris yang dikaji dalam penelitian ini, diharapkan muncul kerangka manajemen pendidikan yang memperkuat ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional di Indonesia serta menjadi model referensi bagi negara berkembang lainnya yang tengah berjuang menyeimbangkan antara kemajuan pendidikan dan tanggung jawab keberlanjutan global.

Tabel 1. Temuan Utama Integrasi Manajemen Pendidikan Berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Aspek/Dimensi	Teori yang Relevan	Konsep Utama	Temuan Penting	Referensi Empiris
Adaptivitas Sistem Pendidikan	<i>Open System Theory</i> (von Bertalanffy, 1950)	Pendidikan sebagai sistem terbuka yang berinteraksi	Efektivitas pendidikan bergantung pada kemampuan adaptasi	Studi Ghamrawi (2023) di Qatar menunjukkan sistem terbuka

		dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi.	terhadap perubahan dan kolaborasi lintas sektor.	memperkuat pencapaian SDG 4 melalui inovasi dan kolaborasi.
Keadilan Akses Pendidikan	<i>Justice Theory</i> (Rawls, 2005)	Prinsip <i>fair equality of opportunity</i> menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara.	Ketimpangan digital memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah urban dan rural; kebijakan nasional harus memperkuat inklusivitas.	Program Indonesia Pintar, Merdeka Belajar, dan Sekolah Digital Desa menjadi implementasi keadilan akses pendidikan di Indonesia.
Peningkatan Mutu Pendidikan	<i>Total Quality Management</i> (Deming, 1986)	Peningkatan mutu berkelanjutan melalui partisipasi seluruh elemen organisasi pendidikan.	Integrasi prinsip TQM dengan SDGs meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan relevansi kurikulum.	Universitas Gadjah Mada melalui <i>Sustainability Office</i> memonitor capaian SDGs di setiap fakultas (SDGS Center, 2025).
Keberlanjutan Sistem Pendidikan	<i>Sustainable Development Theory</i> (Brundtland, 1987)	Pembangunan pendidikan berorientasi lintas generasi dan efisien terhadap sumber daya.	Integrasi nilai keberlanjutan membentuk perilaku sosial dan etika ekologis dalam budaya sekolah.	Program Adiwiyata di Indonesia menunjukkan praktik nyata <i>green education</i> dan tanggung jawab lingkungan (Ismail et al., 2024).
Kepemimpinan Transformasional	<i>Transformational Leadership Theory</i> (Burns, 1978)	Pemimpin menginspirasi perubahan nilai, inovasi, dan visi keberlanjutan.	Kepemimpinan transformasional meningkatkan partisipasi guru dan motivasi intrinsik dalam pembelajaran berkelanjutan.	Implementasi nyata dalam kebijakan <i>Sekolah Penggerak</i> di Indonesia (Lukman & Gistituati, 2024).
Kolaborasi Multi-Pihak	<i>Stakeholder Theory</i> (Freeman & McVea, 2001)	Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan.	Kemitraan lintas sektor memperkuat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial.	Program <i>Kampus Merdeka</i> menunjukkan penerapan kolaboratif antara universitas, industri, dan komunitas (Mehling &

Inovasi Teknologi Pendidikan	<i>Diffusion of Innovation Theory</i> (Rogers et al., 2019)	Adopsi inovasi bergantung pada persepsi manfaat, kemudahan, dan dukungan sosial.	Transformasi digital memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat transparansi tata kelola pendidikan.	Kolleck, 2019). Sekolah Digital Nusantara di Banyuwangi memanfaatkan platform digital terpadu untuk pembelajaran daring (Lestari, 2024).
Integrasi Holistik SDGs dalam Pendidikan	Sintesis Multi-Teori (Open System, Rawls, TQM, Burns, Freeman, Rogers)	Pendidikan berkelanjutan harus mencakup dimensi keadilan, mutu, kolaborasi, inovasi, dan kepemimpinan visioner.	Diperlukan model konseptual tata kelola pendidikan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi hasil untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan sistem nasional.	Rekomendasi penelitian ini menyoroti kebutuhan <i>outcome-based management</i> untuk memperkuat pencapaian SDG 4 di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi manajemen pendidikan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan akses, peningkatan mutu, dan keberlanjutan sistem pendidikan di berbagai tingkatan. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka terhadap 31 artikel ilmiah periode 1950–2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi SDGs dalam manajemen pendidikan menuntut transformasi kelembagaan yang menekankan nilai-nilai partisipatif, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Pendekatan ini sejalan dengan *Open Systems Theory*, yang memandang pendidikan sebagai sistem yang saling berinteraksi antara input, proses, dan output yang harus dikelola secara harmonis untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Selain itu, teori *Transformational Leadership* juga relevan untuk menjelaskan pentingnya peran pemimpin pendidikan dalam menggerakkan perubahan sistemik yang menanamkan nilai keberlanjutan ke dalam tata kelola institusi. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang berhasil mengintegrasikan prinsip SDGs ke dalam sistem manajemen mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, adaptif, dan resilien terhadap tantangan global.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis SDGs dapat memperkuat paradigma pendidikan berkelanjutan yang menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat pembangunan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi manajemen pendidikan yang holistik, misalnya melalui penerapan kurikulum hijau, tata kelola berbasis partisipasi, serta pengukuran kinerja yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memperlihatkan urgensi *policy alignment* antara kebijakan nasional dan target SDG 4, sehingga kebijakan pendidikan dapat selaras dengan prinsip pemerataan dan mutu. Contoh implementasi positif dapat dilihat pada program “Sekolah Adiwiyata” dan inisiatif *Sustainability Office* di Universitas Gadjah Mada, yang membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai SDGs dalam manajemen pendidikan mampu menghasilkan dampak nyata baik secara akademis maupun sosial. Implikasi sosial dan ekonomi dari temuan ini juga menunjukkan bahwa

pendidikan yang berorientasi keberlanjutan membangun kesadaran ekologis serta memperkuat kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi ekonomi hijau (*green economy*).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sumber data yang digunakan terbatas pada artikel ilmiah dan situs kredibel periode 1950–2025, sehingga belum mencakup data longitudinal yang menggambarkan dinamika implementasi SDGs dalam jangka panjang. Kedua, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan hanya memberikan gambaran konseptual, belum mampu mengukur secara kuantitatif hubungan antara integrasi SDGs dan efektivitas manajemen pendidikan. Ketiga, sebagian besar literatur masih berfokus pada konteks kebijakan makro, sementara kajian tentang penerapan langsung di tingkat lembaga pendidikan masih terbatas. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan mixed methods untuk menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam menilai efektivitas penerapan SDGs di bidang pendidikan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan sumber data dengan memasukkan laporan dari lembaga internasional seperti UNESCO, UNDP, dan UNICEF guna memperkaya perspektif global. Bagi pembuat kebijakan, direkomendasikan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pencapaian SDG 4. Lembaga pendidikan diharapkan mengembangkan indikator internal keberlanjutan yang terukur, meningkatkan kapasitas pendidik dalam pengajaran berbasis nilai-nilai SDGs, serta memastikan partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dengan demikian, integrasi manajemen pendidikan berbasis SDGs menjadi instrumen nyata dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

REFERENSI

- Amirova, A., Nurumov, K., Kasa, R., Akhmetzhanova, A., & Kuzekova, A. (2023). The impact of the digital divide on synchronous online teaching in Kazakhstan during COVID-19 school closures. *Frontiers in Education*, 7, 1–13. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.1083651>
- Anugrahmawaty, D. (2025). *Seluruh Sekolah Akan Mendapatkan Program Digitalisasi Sesuai Asas Keadilan dan Pemerataan*. Kemendikdasmen.Go.Id. <https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/13477-seluruh-sekolah-akan-mendapatkan-program-digitalisasi-sesuai-asas-keadilan-dan-pemerataan>
- Burns, J. M. (1978). *Leadership* (Vol. 1). Harper & Row. <https://www.worldcat.org/title/Leadership/oclc/3632001>
- Durrani, N., Qanay, G., Mir, G., Helmer, J., Polat, F., Karimova, N., & Temirbekova, A. (2023). Achieving SDG 4, Equitable Quality Education after COVID-19: Global Evidence and a Case Study of Kazakhstan. *Sustainability*, 15(20), 14725. <https://doi.org/10.3390/su152014725>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Gartner, W. B., Naughton, M. J., Deming, W. E., Gitlow, H. W., Gitlow, S. J., Mann, N., Scherkenbach, W. W., & Walton, M. (1988). The Deming Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 13(1), 138. <https://doi.org/10.2307/258362>
- Ghamrawi, N. (2023). Toward agenda 2030 in education: policies and practices for effective school leadership. *Educational Research for Policy and Practice*, 22(2), 325–347. <https://doi.org/10.1007/s10671-023-09341-8>

- Hoyos, D., Bermejo, R., & Arto, I. (2010). Sustainable Development in the Brundtland Report and Its Distortion: Implications for Development Economics and International Cooperation. In A. A. K. Unceta (Ed.), *Development Cooperation: Facing the Challenges of Global Change* (pp. 13–34). Center for Basque Studies.
- Ismail, K., Rohmah, M., Rahmadani, R., Liana Sari, N., & Azmiyati, A. (2024). Analisis Program Adiwiyata Pada Implementasi Pembelajaran Green Economy dalam Menumbuhkan Karakter Ecological Literacy OKU Timur. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 207–227. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16755>
- Lestari, A. (2024). *Naik Kelas, SMPN 2 Glagah Banyuwangi Launching Sekolah Digital*. Radarbanyuwangi.Jawapos.Com. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/edukasi/754852260/naik-kelas-smpn-2-glagah-banyuwangi-launching-sekolah-digital>
- Lukman, C. A., & Gistituati, N. (2024). Kepemimpinan Transformasional kepala SMK negeri kota padang. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i1.246>
- Mehling, S., & Kolleck, N. (2019). Cross-Sector Collaboration in Higher Education Institutions (HEIs): A Critical Analysis of an Urban Sustainability Development Program. *Sustainability*, 11(18), 4982. <https://doi.org/10.3390/su11184982>
- Nasution, R. (2024). *Green Schools models for implementing sustainability principles: Govt*. ANTARA. <https://en.antaranews.com/news/328155/green-schools-models-for-implementing-sustainability-principles-govt>
- OECD. (2025). *Digital divide in education*. Wwww.Oecd.Org. <https://www.oecd.org/en/topics/digital-divide-in-education.html>
- Perales, F. C., & McCowan, T. (2021). Rewiring higher education for the Sustainable Development Goals: the case of the Intercultural University of Veracruz, Mexico. *Higher Education*, 81(1), 69–88. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00525-2>
- Pham, X. R., & Håkansson, L. M. (2025). Exploring Sustainable Development Goals and Curriculum Adoption: A Scoping Review from 2020–2025. *Societies*, 15(8), 212. <https://doi.org/10.3390/soc15080212>
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of Innovations 1. In *An Integrated Approach to Communication Theory and Research* (pp. 415–434). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203710753-35>
- Sagala, L. P. (2019). Implementation of Adiwiyata “Green School” in Chieving Education for Sustainable Development (Case Study at Forestry Vocational School of Pekanbaru). *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal*, 15(2), 31–35.
- SDGS Center, U. (2025). *Sustainable Development Goals - Discover UGM Contributions to the SDGs by Goal*. Sustainabledevelopment.Ugm.Ac.Id. <https://sustainabledevelopment.ugm.ac.id/>
- Setiawati, R., Evi Setia Ningsih, & Beny Dwi Lukitoaji. (2025). Inovasi Pembelajaran Digital : Solusi Mengatasi Keterbatasan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Basica Academica: Jurnal Pendidikan Anak Sekolah Dasar*, 1(1), 53–59.
- Situmorang, R. P., Sutrisno, A. J., Christian, D., & Wildan Dewanata. (2025). Penguatan Sikap dan Perilaku Pro-Lingkungan Melalui Pendidikan Lingkungan di Sekolah Adiwiyata.

-
- Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 7(2), 458–472.
- Somwaru, L. (2016). The Green School: a sustainable approach towards environmental education: Case study. *Brazilian Journal of Science and Technology*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s40552-016-0023-6>
- Uleanya, C. (2024). Sustainability consciousness in primary schools: roles of leaders in the post/digital era. *Environment, Development and Sustainability*, 26(8), 21783–21796. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-04801-4>
- UNDP. (2025). *What are the Sustainable Development Goals?* Wwww.Undp.Org. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- United Nations. (2024). *GOAL OF THE MONTH – Goal 4 – Quality Education*. Wwww.Un.Org. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month-goal-4-quality-education>
- United Nations. (2025a). *21st Century Skills for Sustainable Development project*. Sdgs.Un.Org. <https://sdgs.un.org/partnerships/21st-century-skills-sustainable-development-project>
- United Nations. (2025b). *Building strong institutions for effective implementation of the SDGs*. Social.Desu.Un.Org. <https://social.desa.un.org/sdn/building-strong-institutions-for-effective-implementation-of-the-sdgs>
- United Nations. (2025c). *Leaving no one behind*. Wwww.Un.Org. <https://www.un.org/en/desa/leaving-no-one-behind>
- von Bertalanffy, L. (1950). The Theory of Open Systems in Physics and Biology. *Science*, 111(2872), 23–29. <https://doi.org/10.1126/science.111.2872.23>
- Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Mäki, S. (2022). School Culture Promoting Sustainability in Student Teachers' Views. *Sustainability*, 14(12), 7440. <https://doi.org/10.3390/su14127440>